

DEMOKRASI DESA TANPA POLITIK UANG

Guno Tri Tjahjoko

Program Studi Strata-1 Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Jl. Timoho No. 317, Yogyakarta

guno@apmd.ac.id

ABSTRACT

The rise of village head elections simultaneously in Indonesia is colored by the findings of money politics. Money politics is a threat to the democratization process in the village. This article discusses the struggle of female candidates without money politics in the Election of the Village Head (Pilkades) Sriharjo in Bantul Regency in 2018. The purpose of this article is to uncover the strategy of winning female candidates without money politics to win the contestation in the Election of Sriharjo Village Chief. The researcher used qualitative methods with a focus on case studies of the Election of Sriharjo Village Heads. Researchers collected primary data through observation, interviews and in-depth discussion of twenty-five people. As for secondary data, researchers collected through library studies, documents, photos, videos and internet. In line with that, testing the validity and reliability of the data is done through the principle of triangulation. After the data is valid and reliable, then it is analyzed through the process of induction, interpretation and conceptualization with the phenomenology paradigm. The findings of this study indicate that with family support, a conscientious approach, intensive socialization to the community and inherent escort to "sniper", money politics can be broken.

Keywords: *village democracy, money politics, intensive socialization, inherent escort*

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Indonesia diwarnai dengan maraknya politik uang. Politik uang merupakan ancaman bagi proses demokratisasi di Desa. Artikel ini membahas tentang pergulatan bakal calon perempuan tanpa politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sriharjo Kabupaten Bantul tahun 2018. Tujuan penulisan artikel ini ialah mengungkap strategi pemenangan kandidat perempuan dengan tanpa politik uang dapat memenangkan kontestasi dalam Pemilihan Kepala Desa Sriharjo. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan fokus studi kasus Pemilihan Kepala Desa Sriharjo. Peneliti mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara dan diskusi mendalam terhadap dua puluh lima orang. Adapun data sekunder, peneliti kumpulkan melalui studi pustaka, dokumen, foto, video dan internet. Selaras dengan itu, uji validitas dan reliabilitas data dilakukan melalui prinsip triangulasi. Setelah data valid dan reliabel, kemudian dianalisis melalui proses induksi, interpretasi dan konseptualisasi dengan paradigma fenomenologi. Temuan penelitian ini menunjukkan dengan adanya dukungan keluarga, pendekatan hati nurani, sosialisasi intensif kepada masyarakat dan pengawasan melekat terhadap 'sniper', politik uang dapat dipatahkan.

Kata-kata kunci: demokrasi desa, politik uang, sosialisasi intensif, pengawasan melekat

1. PENDAHULUAN

Pemilihan pemimpin secara langsung dan serentak baik pada ranah Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah menandai implementasi demokrasi liberal di Indonesia. Penerapan demokrasi liberal tersebut juga diimplementasikan dalam Pemilihan Kepala Desa. Tampaknya dengan penerapan demokrasi liberal dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut telah terjadi 'pemaksaan' nilai-nilai budaya yang berbeda. Sesungguhnya demokrasi liberal bertentangan dengan demokrasi desa di Indonesia. Demokrasi liberal memberlakukan sistem nilai *one person, one vote, one value* - yang cenderung individualistis yang bermula dari budaya Barat. Sementara itu demokrasi desa memberlakukan sistem gotong-royong, musyawarah, mufakat - yang cenderung menekankan kesepakatan bersama atau kolektivitas.

Prinsip *one person, one vote, one value* yang mendasari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tersebut - tidak lain adalah apresiasi terhadap hak-hak individual untuk menentukan pemimpin. Tampaknya tidak diperhatikan adalah kenyataan bahwa kontestasi dalam Pemilihan Kepala Desa yang digelar untuk merayakan hak-hak individual ini dilangsungkan dalam masyarakat yang mengedepankan kolektivitas, termasuk di dalamnya kekerabatan, solidaritas etnis dan sebagainya. Tanpa disadari, ada ketidaksesuaian budaya yang oleh para pakar politik diabaikan implikasinya. Seolah-olah kontestasi untuk menentukan pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa merupakan satu-satunya cara mewujudkan kedaulatan rakyat.

Implikasi dari penerapan sistem nilai yang diatas namakan demokrasi tersebut

seakan kedap dari sistem budaya kekerabatan dalam masyarakat Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia telah hidup dalam sistem budaya kekerabatan selama berabad-abad lamanya, dan oleh karenanya tidak mungkin diabaikan kapasitasnya mementahkan sistem nilai budaya yang diberlakukan. Pada kenyataannya pasca reformasi dengan penerapan sistem demokrasi liberal - hal ini tidak menghapuskan nilai-nilai budaya lokal. Bahkan, pemberlakuan demokrasi liberal tersebut dibarengi dengan tidak kunjung matangnya, kalau bukan melemahnya partai politik dalam mengagregasi kepentingan masyarakat. Salah satu dampak negatif dari penerapan demokrasi liberal dalam Pemilihan Kepala Desa ialah maraknya bakal calon melakukan tindakan memberikan uang dan barang untuk 'membeli suara' masyarakat. Selain itu kecenderungan pemilihan pemimpin secara langsung oleh masyarakat dimaknai sebagai pewujudan demokrasi, namun efek negatif dari penerapan demokrasi memunculkan oligarkhi elite politik (Bnd.Hammar, 2017; Bnd.Vengroff et.all, 2018; Bnd. Berger, 2017; Haskel, 2018).

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian seputar Pilkades. Ada beberapa penelitian sebidang yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu: Penelitian Pilkades di Kabupaten Sragen dan Kediri yang dilakukan oleh Syahbudin (2000) dan Hidayat dan kawan-kawan (2018). Temuan Syahbudin dan Hidayat dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kandidat yang menang menggunakan orang pintar (dukun), mendekati tetangga dengan membagi uang dan barang dan mengadakan bancakan atau slametan. Kelemahan metode Syahbudin dan Hidayat dalam penelitian ini hanya memaparkan secara naratif, peneliti kurang mengeksplorasi secara mendalam interaksi

antar kandidat dan strategi pemenangannya. Dalam hal ini peneliti kurang kritis mengkaji fenomena dan mencari makna, misalnya: penggunaan dukun dalam Pilkades. Figur dukun atau orang pintar dalam Pilkades sering kurang mendapat tempat untuk diteliti- apakah kemenangan kandidat Lurah, karena faktor dukun atau faktor elektabilitas?

Selaras dengan hal tersebut, kandidat yang memberikan uang, barang dan jasa seperti bancakan/slametan - menarik untuk dikaji. Pemberian uang, barang dan jasa apakah ada korelasinya dengan kemenangan kandidat Lurah? Kalau faktor pemberian uang, barang dan jasa menjadi penentu kemenangan kandidat Lurah, bukankah hal tindakan politik uang - yang dapat dikenai sanksi pidana? Data tentang peranan dukun dan pemberian uang, barang dan jasa tersebut perlu diformulasikan dan ditafsirkan, sehingga peneliti menemukan makna yang mendalam.

Selain itu penelitian tentang gaya kepemimpinan yang demokratis dilakukan oleh Prasetyoningsih dan Adi (2016) dengan metode kualitatif naratif. Tampaknya ada korelasi gaya kepemimpinan yang demokratis yang menarik respek masyarakat terhadap Kepala Desa. Prasetyoningsih dan Adi (2016) meneliti tentang strategi perempuan Kepala Desa dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis di Kabupaten Kendal. Hasil temuan Prasetyoningsih dan Adi (2016) menunjukkan kepemimpinan perempuan diterima oleh masyarakat, karena dia sering blusukan dan peduli terhadap permasalahan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Kabupaten Kendal yang berbudaya patriarkhi, seorang perempuan dianggap tidak layak memimpin laki-laki. Namun

Kepala Desa (perempuan) dengan strategi blusukan dan peduli terhadap masyarakat dapat diterima. Kelemahan metodologi Prasetyoningsih dan Adi (2016) ialah kurang banyak wawancara dan diskusi mendalam yang melibatkan masyarakat. Hal ini terbukti peneliti tidak menyampaikan data hasil wawancara dan diskusi mendalam. Peneliti telah memasukkan pikirannya ke dalam teks, tanpa merujuk data primer temuan di lapangan. Padahal dalam penelitian kualitatif, salah satu syaratnya ialah data primer yang ditafsirkan secara konsisten. Data primer dalam bentuk pembicaraan langsung antara peneliti dengan subjek - diungkap dalam naskah dan ditafsirkan oleh peneliti tanpa memasukkan pendapat atau pikiran pribadi ke dalam teks.

Untuk meneliti gaya kepemimpinan tidak cukup hanya mewawancarai Lurah dan perangkat Desa, namun perlu wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok perempuan, pemuda/pemudi, pengurus RT/RW, pengurus PKK dan lain-lain. Oleh karena melalui wawancara dengan masyarakat secara langsung dapat diketahui respon objektif mereka terhadap gaya kepemimpinan Kepala Desa. Selain itu dengan metode pengambilan data melalui fokus diskusi mendalam terhadap kelompok masyarakat - peneliti akan mendapatkan data primer yang objektif.

Selaras dengan hal tersebut Karim (2004) meneliti tentang kepemimpinan perempuan di Pamekasan Madura - hasil temuannya mengindikasikan dukungan masyarakat dan budaya menjadikan pemimpin perempuan dapat menang dalam Pilkades. Namun sebaliknya menurut Supardi (2011) yang meneliti tentang kebijakan pengarusutamaan gender dalam Pilkades serentak di Jember - ternyata peran

perempuan masih minim hanya 9% (640 orang) dari 7228 kandidat Kepala Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa di satu sisi perempuan berpotensi untuk menjadi Kepala Desa, namun di sisi lain dia kurang tertarik untuk merebut kekuasaan dalam Pilkades.

Selaras dengan hal tersebut, kontestasi antar kandidat dalam Pilkades diperlukan strategi kemenangan, dimana politik uang atau serangan fajar dianggap sarana yang efektif untuk memengaruhi perilaku pemilih. Penelitian tentang Pilkades relasinya dengan politik uang dilakukan juga di Kabupaten Pati (Fitriyah, 2015), Nganjuk (Ratnasari dan Adi, 2016), Magetan (Harianto dkk, 2018), Kediri (Ainillah, 2016) dan Tulungagung (Hidayat dkk, 2018). Hasil temuan para peneliti tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak kandidat memberikan uang, maka dia akan menang dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Namun kelemahan para peneliti tersebut ialah tidak menggambarkan bagaimana kerja tim sukses secara rinci, misalnya: pemberian uang, barang dan jasa ke pemilih - apakah diberikan langsung atau tidak langsung. Sesungguhnya dengan mengeksplorasi secara mendalam data jumlah rupiah yang diberikan dan latarbelakang penerima- menarik untuk membuat kajian baru. Namun hal ini tidak dilakukan oleh para peneliti, sehingga hasil penelitian kurang mendalam (Bnd. Aspinall dan Sukmajati, 2015). Selain itu para kandidat dalam Pilkades kurang mengetahui dampak hukum yang dilakukan dengan melibatkan tim sukses untuk melakukan politik uang. Para kandidat, tim sukses dan penerima uang, barang dan jasa dapat dijerat dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi (Widyawati, 2018).

Tampaknya penelitian tentang politik uang dalam Pemilu/Pilkades juga marak terjadi di Asia (Aspinall dan Rohman, 2017; Bjorkmen, 2014; Cramer, 2016; Callahan, 2018; Johnston, 2014). Maraknya politik uang dalam Pemilu/Pilkades mengindikasikan bahwa fenomena ini sudah lazim. Penelitian Malong (2017) di Tago, Surigao del Sure, Filipina membuktikan bahwa kandidat memberikan uang dan barang kepada masyarakat. Malong membuktikan bahwa untuk memperoleh dukungan suara, kandidat memberikan uang dan barang, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu dan belum melek politik. Hal ini membuktikan bahwa pada tataran masyarakat bawah - politik transaksional dapat diterima. Mereka tidak peduli terhadap perbuatannya yang diancam sanksi hukuman pidana atau perdata. Yang lebih ironi lagi, mereka tidak tahu bahwa dengan menerima uang dan mencoblos kandidat - mereka telah menggadaikan kedaulatan rakyat.

Menurut Muhtadi (2013) diperkirakan sekitar tiga juta masyarakat Filipina menerima uang dan barang dari kandidat dalam Pemilu 2002. Demikian juga di Thailand, tiga puluh persen responden kepala keluarga ditawarkan uang dan barang oleh elite politik (Fang, 2016; Hewison, 2017). Praktik politik uang dalam Pemilu juga terjadi di Taiwan, dua puluh tujuh persen responden ditawarkan uang dan barang oleh tim sukses dalam Pemilu 1999. Faktor pemberian uang dan barang oleh tim sukses kepada pemilih yang memotivasi mereka memilih kandidat. Selaras dengan hal tersebut Heath dan Tillin (2017) meneliti di Madhya Pradesh, India - mereka menemukan penyebab adanya politik uang, yakni kemiskinan dan masyarakat kurang berpendidikan.

Selaras dengan hal tersebut, penelitian korelasi antara *vote buying* (beli suara) dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Nigeria dilakukan Adotujelegan (2018). Temuan Adotujelegan (2018) membuktikan adanya korelasi antara pemberian kepada orang miskin dalam bentuk pembangunan jalan, rumah dan fasilitas umum dengan keterpilihan kandidat. Pemberian uang dengan menggunakan sarana keuangan negara untuk kepentingan pribadi, agar kandidat terpilih dalam Pemilu/Pilkades menjadi modus terselubung. Sang kandidat biasanya petahana yang mencalonkan diri lagi dalam Pemilu- dia menginstrumentasi penggunaan anggaran pemerintah dalam rangka membangun infrastruktur dan pelayanan publik (Adotujelegan, 2018; Bnd. Aspinal dan Sukmajati, 2015).

Memperhatikan fenomena maraknya permasalahan politik uang di Indonesia dan Asia yang berdampak ke Pemilu/Pilkades tersebut di atas - hal ini menjadi keprihatinan bersama. Sebab demokrasi yang berkualitas membutuhkan kedewasaan masyarakat dan elite politik dalam hal berpolitik. Maraknya praktik politik uang yang dilakukan oleh kandidat dalam Pemilu/Pilkades mengindikasikan adanya kemunduran dan stagnannya proses demokrasi di ranah masyarakat. Proses demokratisasi pada ranah desa pun mulai terkoyak dengan adanya Pilkades serentak. Masyarakat miskin dan terpinggirkan rentan dengan politik uang, oleh karena itu mendesak dilakukan penelitian inovatif yang memberikan wacana baru. Penelitian ini berbeda dengan para peneliti sebelumnya baik dari segi metodologi, konseptual maupun kerangka pikir. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penggunaan pendekatan fenomenologi bertujuan menemukan orisinalitas dari pelaku (subjek) yang menjadi dasar data primer yang valid dan reliabel. Adapun pertanyaan mendasar dari penelitian ini ialah bagaimana strategi kandidat dalam kontestasi Pilkades tanpa politik uang?

Artikel ini memaparkan tentang pergulatan bakal calon perempuan memenangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan tanpa politik uang. Dalam arena kontestasi Pilkades serentak dan langsung (*one person, one vote, one value*), dimana masyarakat Desa memilih langsung kandidat Lurah, maka suatu keniscayaan kandidat akan menginstrumentasi uang untuk membeli suara pemilih. Ada anggapan masyarakat bahwa tanpa politik uang kandidat tidak akan menang dalam kontestasi Pilkades. Sebaliknya penelitian ini membuktikan sebaliknya bahwa tanpa politik uang kandidat perempuan dapat menang mutlak.

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Desa Sriharjo Kabupaten Bantul selama tiga bulan (Februari - April 2019) pasca Pilkades 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus sebagai metode kajiannya. Studi kasus dipilih sebagai metode kajian dalam penelitian ini, karena memiliki kelebihan yang mendalam dalam rangka menjelaskan suatu topik atau fenomena yang dialami oleh para pelaku (subjek). Selain itu metode studi kasus juga memiliki keunggulan, karena pengungkapan atau pemaparan dilakukan secara komprehensif, sehingga menghasilkan pengetahuan (teori) yang relevan. Ringkasnya penelitian dengan metode studi kasus berupaya mengungkap kompleksitas masalah untuk membangun

suatu kerangka pikir (pengetahuan) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, kelompok diskusi mendalam dan observasi (Stake, 2005; Yin, 1986; Creswell, 2007)

Pengumpulan data primer dilakukan peneliti melalui wawancara dan diskusi mendalam terhadap dua puluh lima orang (25 orang) yang terdiri dari panitia pemilihan Pilkades, Kepala Desa, perangkat Desa, mantan ketua Badan Permusyawaratan Desa, keluarga dan tim pemenang. Adapun dalam rangka pengumpulan data primer, peneliti melakukan kegiatan tiga tahap, sebagai berikut:

Pertama, observasi. Langkah pertama yang peneliti lakukan ialah melakukan observasi ke Desa Sriharjo Kabupaten Bantul. Peneliti melakukan kegiatan keliling Desa untuk mendapatkan gambaran makro. Peneliti melihat keseharian penduduk Sriharjo yang sebagian besar petani. Peneliti juga mengamati kondisi bangunan pemerintah dan rumah-rumah penduduk yang terkesan sederhana dibanding Desa yang lain. Fasilitas pelayanan publik terkesan kurang terawat, misal: pusat kesehatan masyarakat, sekolah dan kantor kelurahan. Selain itu peneliti mendatangi kantor kelurahan Sriharjo dan memperkenalkan diri secara formal. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan datang ke Desa Sriharjo.

Kedua, wawancara. Setelah melakukan observasi dan perkenalan diri, peneliti melakukan wawancara. Sebelum wawancara, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang meliputi proses Pilkades Desa Sriharjo, motif kandidat, modal kandidat, strategi kampanye, strategi mengatasi politik uang dan program unggulan. Setelah pedoman wawancara selesai dibuat, langkah selanjutnya peneliti

melakukan wawancara terhadap Lurah, Sekretaris Desa (Carik) dan aparat Desa. Dalam proses wawancara tersebut peneliti merekam dan mendokumentasikan. Supaya tidak terkesan menginvestigasi, peneliti melakukan wawancara dengan gaya santai sambil ngobrol. Hasil wawancara tersebut, peneliti catat dan pilah-pilah dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan uji validasi dengan cara membandingkan antara pernyataan Lurah, Carik dan aparat Desa. Ketiga responden tersebut mengalami dan saksi langsung (fenomena) kontestasi Pilkades. Hal ini penting dalam penelitian kualitatif, dimana data primer haruslah didapat dari pelaku atau yang mengalami langsung - Lurah sebagai peserta Pilkades, Carik dan aparat Desa sebagai Panitia Pilkades. Namun data tersebut tetap divalidasi melalui membandingkan atau cek/riccek. Ternyata pernyataan Lurah, Carik dan panitia pemilihan selaras dan padu, sehingga valid datanya. Tujuan validasi data tersebut ialah untuk menemukan keandalan (reliabilitas) data. Data yang telah divalidasi dan reliabel dapat dijadikan rujukan untuk memformulasikan pengetahuan atau karya ilmiah.

Ketiga, diskusi kelompok mendalam. Kegiatan diskusi kelompok mendalam dengan peserta dua puluh dua (22) orang yang terdiri, sebagai berikut: dukuh, gabungan kelompok tani, tim sukses, keluarga, Karang Taruna dan pengurus Rukun Tetangga bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman mereka, khususnya proses pemenangan dan strategi mematahkan politik uang. Peneliti mengelola diskusi kelompok mendalam dengan acara makan malam bersama. Setelah makan malam, kemudian peneliti memberikan pertanyaan yang dijawab spontan oleh para peserta. Dari jawaban

peserta tersebut, kemudian peneliti kembangkan dengan minta pandangan dari peserta yang lain. Dari pengalaman peneliti memimpin jalannya diskusi tersebut terkesan mengalir dan santai, sehingga semua peserta berbicara apa adanya tentang pengalaman menjadi relawan tim pemenangan tanpa dibayar. Jiwa kesukarelawanan tersebut, peneliti perdalam dengan berbagai pertanyaan yang dikaitkan dengan politik uang.

Data hasil diskusi kelompok mendalam tersebut, peneliti pilah-pilah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Namun data tersebut juga harus divalidasi, agar dapat diandalkan keakuratannya. Cara untuk menguji data kualitatif tersebut, peneliti melakukan komparasi antara data Lurah dengan semua peserta diskusi. Apakah data dari Lurah sinkron dan selaras dengan data hasil diskusi kelompok mendalam? Dengan kata lain, untuk menguji data primer (Lurah), peneliti membandingkan dengan dua puluh dua (22) orang. Ternyata data primer (Lurah) sinkron dengan data hasil diskusi mendalam. Dengan demikian data hasil diskusi mendalam tersebut dapat diandalkan keakuratannya dan dapat dipergunakan dalam memformulasikan pengetahuan atau karya ilmiah.

Adapun data sekunder peneliti kumpulkan melalui studi jurnal-jurnal Nasional dan Internasional yang terakreditasi dengan masa penerbitan lima (5) tahun terakhir. Demikian juga dengan studi literatur melalui buku-buku dengan masa penerbitan lima (5) tahun terakhir. Pemilihan penerbitan lima tahun terakhir dimaksudkan untuk menjaga kebaruan data dan akualitas topik, baik pada ranah Nasional maupun Internasional. Sementara itu pengumpulan data sekunder dalam bentuk video kampanye, foto dan internet

dimaksudkan untuk melengkapi data visual. Selain itu melalui melihat video dan foto-foto kontestasi Pilkades Sriharjo, peneliti mendapatkan gambaran situasi pada saat itu. Dengan demikian peneliti dapat merasakan apa yang dialami oleh kandidat, tim sukses dan masyarakat Sriharjo dalam Pilkades.

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, peneliti melakukan tiga langkah sebagai berikut: *Pertama, memilih data primer yang sudah tervalidasi.* Langkah pertama yang peneliti lakukan ialah memilah-milah data primer yang tervalidasi untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Kemudian data primer yang sudah teruji dan akurat (reliabel) dianalisis dan diformulasikan untuk membangun suatu konsep pengetahuan. Tentunya data primer yang sudah tervalidasi tersebut merupakan jawaban permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti tidak memasukkan pikiran atau narasi baru yang justru dapat mengaburkan konsep pengetahuan yang akan dikonstruksikan.

Kedua, membuat skema kerangka pikir. Setelah data primer tervalidasi, langkah selanjutnya ialah membuat skema kerangka pikir yang merupakan hasil temuan dalam penelitian ini. Untuk membuat skema kerangka pikir, peneliti melakukan pemilihan data primer, kemudian menyusun alur atau logika berpikir. Logika berpikir skema kerangka pikir dikonstruksi dari data primer yang telah tervalidasi. Dengan adanya skema kerangka pikir tersebut, peneliti dapat memformulasikan konsepsi pengetahuan.

Ketiga, memformulasikan konsepsi pengetahuan. Berdasarkan data primer yang tervalidasi dan skema kerangka pikir yang telah dibuat tersebut, langkah selanjutnya peneliti menganalisis dan mendeskripsikan dalam formulasi kata-kata (pengetahuan).

Formulasi kata-kata tersebut merupakan temuan hasil penelitian dan validasi data primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan (paradigma) fenomenologi yang memiliki orisinalitas, karena memfokuskan pada kejadian yang dialami oleh responden (subjek pelaku) dalam Pilkada Sriharjo tahun 2018. Menurut Creswell (2015:105) tujuan pendekatan fenomenologi ialah untuk mengeksplorasi pengalaman individu (subjek pelaku) menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari konsepsi pengetahuan. Ringkasnya, pendekatan fenomenologi ialah mencari makna konseptual dibalik apa yang dialami oleh subjek pelaku.

3. PEMBAHASAN

3.1. Demokrasi Desa

Secara etimologi kata demokrasi (Yunani) terdiri dari dari kata demos (rakyat) dan kratein (kekuasaan). Jadi definisi demokrasi ialah kekuasaan/kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian, memaknai demokrasi desa ialah kekuasaan/kedaulatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bermuara dari nilai-nilai asli desa (Bnd. Heywood, 2018; Cooke, Maeve, 2018; Almond dan Verba, 2015). Aristoteles mendefinisikan negara ialah persatuan antar keluarga dan desa (Bnd. Rahe, 2017; Hoipkemier, 2018; Trott, 2019). Artinya negara tidak akan ada, bila keluarga-keluarga dan desa tidak menghendaki. Dalam konteks demokrasi, Aristoteles berpandangan bahwa pemilihan langsung pemimpin adalah wujud kedaulatan rakyat, Rakyatlah yang berdaulat bukan negara atau elite politik, sebab secara esensi demokrasi ialah kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu tujuan didirikan negara adalah dalam rangka mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat.

Selaras dengan pikiran Aristoteles tersebut, Mohammad Hatta (1966) memaparkan bahwa demokrasi kita bermuara pada musyawarah di desa. Demokrasi Indonesia bukan dari Barat atau demokrasi yang otoriter, melainkan demokrasi sosial (asli) yang berpedoman pada nilai-nilai dalam masyarakat desa. Selanjutnya Hatta (1966: 27) menuliskan, sebagai berikut:

“Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia Merdeka di masa datang. Tidak semua dari yang tampak bagus pada demokrasi desa dapat dipakai pada tingkat yang lebih tinggi dan modern. Tetapi sebagai dasar ia dipandang berguna. Bagaimanapun, orang tak mau melepaskan cita-cita demokrasi sosial, yang sedikit-banyak bersendi pada organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri.”

Kutipan tersebut mengindikasikan bahwa demokrasi sosial (asli) bermuara pada masyarakat desa yang guyub rukun dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Bahkan masyarakat desa bisa menyingkirkan pemaksaan hak raja melalui demonstrasi ke hadapan raja. Dengan demikian masyarakat desa memiliki otonomi dan kedaulatan dalam hal mengelola pemerintahan.

Menurut Hatta (1966) demokrasi sosial (asli) dilatarbelakangi adanya pengaruh demokrasi liberal yang berkembang di Barat dan adanya budaya kolektivisme. Demokrasi sosial bukan demokrasi liberal yang mengacu *one person, one vote, one value*. Demokrasi

sosial mengutamakan rapat, mufakat dan gotong royong. Artinya dalam konteks Pemilihan Kepada Desa - masyarakat mengadakan musyawarah untuk menentukan Kepala Desa. Namun dalam proses politik, pemerintahan desa diperalat baik secara langsung atau tidak langsung oleh kepentingan Negara (Maschab, 2013:173). Hal ini tampak dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pilkadaes, dimana pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung. Hal ini mengabaikan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang mengedepankan kolektivitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Pasal 34 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Memperhatikan Pasal 34 tersebut tersurat bahwa prinsip *one person, one vote, one value* diterapkan dalam Pilkadaes dan telah menggantikan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang merupakan budaya asli masyarakat desa. Dengan demikian pandangan Maschab (2013) tentang pemerintahan desa yang diperalat oleh kepentingan besar terbukti. Oleh karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mensahkan Pemerintah, maka dengan sadar Pemerintah menerapkan Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang menggantikan demokrasi sosial (asli) diganti dengan demokrasi liberal.

Selaras dengan penerapan demokrasi liberal dalam Pilkadaes, Robert Dahl berpendapat demokrasi ialah praktik pemerintahan dimana kekuasaan diperebutkan, dan perebutan itu dilakukan

secara jujur dan adil melalui Pemilu/Pilkada (Bnd. Moran dan Parry, 2015; Held, 1987; Zhao, 2017). Bahwa dengan menjalankan pemilihan pemimpin secara langsung proses demokrasi akan terwujud. Menurut Diamond konsepsi demokrasi terdiri dari dua, yakni: (1) *electoral democracy* dan (2) *liberal democracy*. Yang dimaksud dengan *electoral democracy* ialah sistem pemerintahan dalam suatu negara bangsa, dimana masyarakat memilih langsung pemimpin melalui pemilihan yang jujur dan adil. Sistem *electoral democracy* yang diterapkan seperti di Athena tersebut memiliki kelemahan, kalau diterapkan dalam masyarakat yang majemuk.

3.2. Patronase dan Politik Uang

Larangan memberikan uang, barang dan jasa telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan, namun kandidat Pilkadaes menganggap hal ini tidak penting, karena pesaingnya juga melakukan pemberian yang sama. Hal ini selaras dengan pandangan Weiss (2016) yang meneliti perilaku pemilih dalam Pemilu 2013 di Malaysia. Temuan Weiss menunjukkan bahwa partai berkuasa (pemerintah) menginstrumentasi patronase melalui bantuan infrastruktur dan non infrastruktur. Elite partai politik menginstrumentasi program pemerintah untuk memengaruhi perilaku pemilih, khususnya di daerah pinggiran atau kantong kemiskinan.

Masyarakat memahami pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah adalah hal yang wajar. Namun elite partai politik bertendensi menginstrumentasi pemberian bantuan sosial sebagai strategi kampanye. Ironinya masyarakat menganggap politik transaksional sebagai kewajaran, sehingga ketika caleg kampanye ke desa-desa, mereka minta imbalan uang atau barang

kepada kandidat yang mendatangnya. Artinya mereka secara terang-terangan meminta kepada kandidat tanpa merasa bersalah. Tindakan masyarakat yang meminta imbalan kepada tim sukses atau kandidat, mengindikasikan bahwa masyarakat semakin permisif dan menganggap politik uang hal yang lazim.

Menurut Kumorotomo tindakan politik uang dilakukan, sebagai berikut: *Pertama, uang diberikan secara langsung.* Politik uang langsung diwujudkan kandidat atau tim sukses dengan cara membagi-bagikan langsung kepada masyarakat (Halili, 2009). Dalam hal ini, kandidat mendatangi dari rumah ke rumah dengan membawa uang yang diberikan langsung kepada masyarakat. Selain itu kandidat juga memberikan uang dalam kampanye tertutup atau terbuka, dimana kandidat memberikan hadiah uang kepada peserta kampanye yang harganya melebihi batas aturan.

Kedua, uang diberikan tidak langsung. Maksudnya politik uang tidak langsung ialah kandidat tidak memberikan uang, namun kandidat melalui tim sukses membagi-bagikan barang kepada masyarakat, Dalam hal ini tim sukses yang mendatangi dari rumah ke rumah untuk membagi-bagikan barang. Untuk kasus Pilurdes, kandidat memberikan sembako, kambing, sapi, sepeda motor dan lain-lain dalam rangka 'membeli' suara pemilih.

Selaras dengan hal tersebut, Aspinall dan Sukmajati (2015) mengkaji tentang maraknya politik uang di Indonesia dengan pendekatan yang berbeda dengan para peneliti sebelumnya. Aspinall dan Sukmajati (2015) berpendapat bahwa elite politik atau kandidat menggunakan strategi kampanye dengan pendekatan patronase (Shefter, 1994:283; Hutchcroft, 2014:176-177). Elite selaku kandidat (patron) dalam pemilihan membeli suara (*vote buying*),

memberi barang (*club good*) dan pembangunan sarana publik (*pork barrel politic*). Dalam mewujudkan strategi politik uang tersebut, kandidat menggunakan 'broker' atau tim sukses yang bertugas memberikan uang dan barang kepada pemilih. Aspinal (2015:4) mendefinisikan patronase sebagai relasi antara patron (kandidat) dengan klien (pemilih) yang di dalamnya terjadi pembelian suara (*vote buying*), dimana transaksi pemberian uang dan barang terjadi. Pandangan Aspinal tentang patronase tersebut selaras dengan Muhtadi (2013:3) yang berpendapat bahwa budaya patronase sebagai sumber dari politik uang di negara berkembang. Asumsi Aspinal dan Muhtadi, karena masyarakat di negara berkembang masih banyak yang buta huruf, miskin dan kurang modern. Menurut Muhtadi (2013) adanya relasi patronase dan tidak adanya kedekatan dengan partai politik menyebabkan suburnya politik uang (Apple dan Eleni, 2018; Atia dan Catherine, 2018).

3.3. Gambaran Umum Desa, Sriharjo, Bantul

Desa Sriharjo merupakan wilayah administratif Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun luas wilayah Desa Sriharjo 501,36Ha, yang bertipologi persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan dan usaha kecil. Desa Sriharjo memiliki 13 Dusun, yaitu: (1) Dusun Miri, (2) Jati, (3) Mojohuro, (4) Pelemadu, (5) Sungapan, (6) Gondosuli, (7) Trukan, (8) Dogongan, (9) Ketos, (10) Ngrancah, (11) Pengkol, (12) Sompok, dan (13) Wunut. Dengan Wilayah terluas yaitu Wunut dan wilayah terkecil adalah Dogongan. Adapun komposisi penduduk Desa Sriharjo, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Sriharjo, Bantul

No.	Penduduk	Jumlah/Jiwa
1.	Laki-laki	5.047
2.	Perempuan	5.361
3.	Usia 1-15 Tahun	1.940
4.	Usia 15-65 Tahun	6.897
5.	Usia 65 Tahun ke atas	1.267
	Jumlah	10.408 (3.020 KK)

Sumber: Buku Monografi Desa Sriharjo Semester I Tahun 2018

Dengan memperhatikan Tabel 1.1 tersebut di atas, tampaknya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki (selisih 314 jiwa). Dengan realita jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, maka munculnya dua kandidat perempuan dalam Pilkades Sriharjo, yakni: (1) Lily Wakhidah, S.Ag Ketua BPD Sriharjo dan (2) Titik Istiyawatun Khasanah, S.IP adalah hal yang dapat dimaklumi masyarakat. Selain itu penduduk usia produktif berjumlah lebih dari lima puluh persen (usia 15-56 tahun) - hal ini

mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk membangun dan memandirikan Desa Sriharjo.

Namun penduduk miskin di Desa Sriharjo tergolong tinggi, yakni: 8.288 jiwa - hal ini menjadi rawan terhadap politik uang dalam Pilkades. Sebab masyarakat miskin sangat rentan dengan bujukan dan pemberian uang untuk memilih salah satu kandidat Lurah. Gambaran ekonomi Desa Sriharjo secara makro dipaparkan melalui Tabel 2 tentang mata pencaharian penduduk, sebagai berikut:

Tabel 2. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sriharjo, Bantul

No.	Pekerjaan	Jumlah/orang
1.	Pegawai Negeri Sipil	142
2.	TNI/Polri	56
3.	Swasta	957
4.	Wiraswasta/Pedagang	834
5.	Petani	821
6.	Tukang	353
7.	Buruh Tani	765
8.	Pensiunan	74
9.	Peternak	280
10.	Jasa	291
11.	Pengrajin	38
12.	Pekerja Seni	10
13.	Pengangguran	575
14.	Lainnya	2054
	Jumlah	7250

Sumber: Buku Monografi Desa Sriharjo Semester I Tahun 2018

Memperhatikan data Tabel 2 tersebut tampaknya masyarakat yang rentan terhadap praktik politik uang ialah kelompok pengangguran dan lainnya yang

jumlahnya 2.629 orang. Apabila kandidat mempraktikkan politik uang terhadap kelompok pengangguran tersebut, maka diprediksi dia akan menang, sebab jumlah

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkades Sriharjo 6.055 orang.

Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Lurah Desa Sriharjo, Bantul adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana masyarakat memilih langsung pemimpin. Adapun tahapan Pilkades Sriharjo dilaksanakan melalui tahapan pencalonan, pemungutan

suara dan penetapan. Pilkades Sriharjo dilaksanakan tanggal 14 Oktober 2018 diikuti 3 kandidat, yakni: (1) Lily Wakhidah, S.Ag., (2) Titik Istiyawatun Khasanah, S.IP dan (3) Tusiman. Setelah melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara dan penetapan, Panitia Pemilihan Lurah Sriharjo menetapkan hasil, sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Perolehan Suara Pilkades Sriharjo, Bantul

No.	Nama Kandidat	Perolehan Suara
1.	Lily Wakhidah, S.Ag.	519
2.	Titik Istiyawatun Khasanah, S.IP	4.681
3.	Tusiman	632
4.	Suara Tidak Sah	223
	Jumlah Pemilih	6.055

Sumber: <https://sriharjo.bantulkab.go.id/>, diakses tanggal 5 April 2019

3.4. Strategi Pemenangan Pilkades

Artikel ini hanya memfokuskan pada strategi pemenangan kandidat perempuan dalam Pilkades, Sriharjo. Kata strategi/strategy didefinisikan sebagai berikut:

“a detailed plan for achieving success in situations such as war, politics, business, industry, or sport, or the skill of planning for such situations.” (<https://dictionary.cambridge.org/> diakses 5 April 2019).

Secara ringkas, strategi adalah suatu rencana untuk memenangkan suatu kontestasi baik dalam politik, bisnis, industri dan olahraga. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dan diskusi mendalam. Sementara itu konsepsi teori mbingkai penelitian ini, namun temuan lapangan tidak sesuai dengan teori yang ada. Oleh karena itu, untuk memaparkan strategi pemenangan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

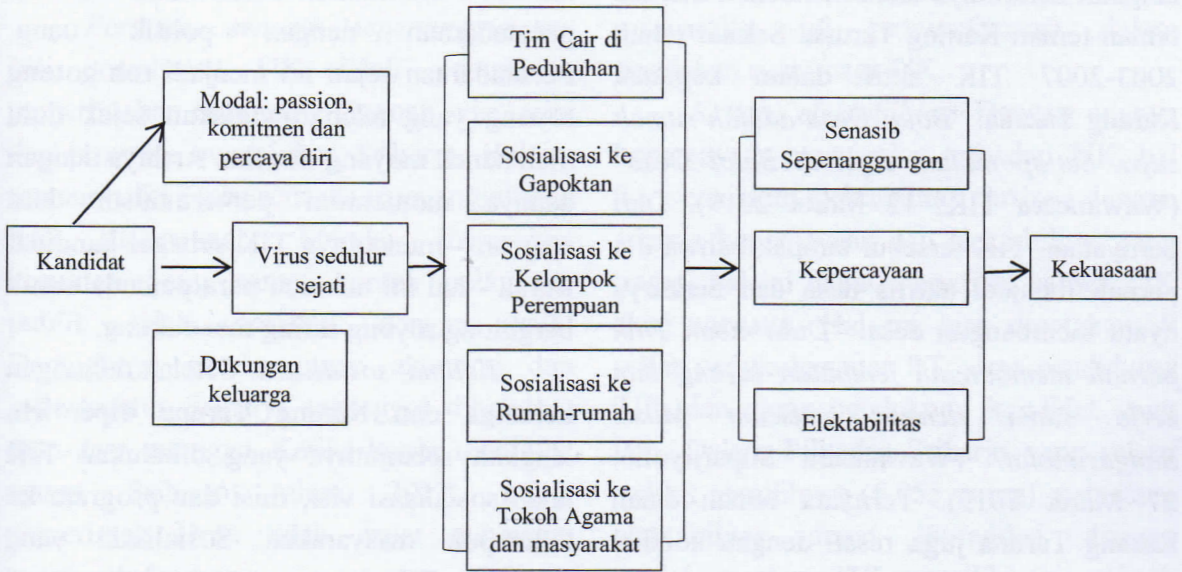
Gambar 1 tentang Strategi Pemenangan Pilkades, Sriharjo, Bantul

berdasarkan wawancara penulis dengan Titik Istiyawatun Khasanah (TIK) selaku kandidat pemenang dan tim sukses. Ketika peneliti bertanya kepada TIK, apa modal untuk mencalonkan diri sebagai lurah? *“Saya merasa bersalah, karena tidak memberi kontribusi kepada masyarakat Sriharjo. Saya harus pulang untuk membangun desa. Modal saya untuk mencalonkan diri sebagai Lurah adalah komitmen dan percaya diri”* (Wawancara TIK, 12 Maret 2019). Dari jawaban TIK tersebut dapat ditarik makna tentang strategi pemenangan Pilkades, sebagai berikut:

Pertama, modal percaya diri. Modal percaya diri dan komitmen untuk membangun Sriharjo lebih maju yang mendorong TIK sebagai perempuan mencalonkan diri sebagai Lurah. Modal percaya diri tersebut penting bagi TIK, karena dia tidak memiliki modal uang yang cukup. Oleh karena TIK tidak memiliki modal uang, sementara pesaingnya memiliki modal uang yang banyak - hal ini rawan dengan praktik politik uang. Namun

modal percaya diri ini dilatarbelakangi adanya panggilan hati (*passion*) melihat kenyataan mantan lurah terdahulu masuk penjara, karena kasus korupsi. Sementara

pejabat pelaksana tugas Lurah tidak dapat mengambil kebijakan ketika ada bencana dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.



Gambar 1. Strategi Pemenangan Tanpa Politik Uang

Dalam hal ini TIK juga mendapatkan momentum yang tepat untuk mencalonkan diri sebagai Lurah, karena tidak adanya figur pemimpin pembaharu.

“Kantor Lurah tidak setiap hari buka. Staf Kelurahan tidak setiap hari ke kantor. Pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan baik. Kami membutuhkan pemimpin yang dapat membawa perubahan Sriharjo.” (Wawancara Bambang, 27 Maret 2019)

Ringkasnya, pemerintahan desa dalam kondisi yang memprihatinkan, karena pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dalam kurun waktu 3 tahun lebih. Dampak dari tidak berjalan pelayanan pemerintahan desa ialah desa tertinggal dibanding desa-desa yang lain, khususnya dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Momentum kolapnya pemerintahan desa

semakin menguatkan percaya diri TIK untuk maju sebagai lurah.

Kedua, modal sosial. Dengan bermodal percaya diri saja tidaklah cukup, oleh karena itu TIK memanfaatkan momen silaturahmi pertemuan trah keluarga dalam rangka pasca Lebaran 2018. *“Mbak Titik mau mencalonkan diri sebagai Lurah, kumpulkan keluarga besar dulu”* (Wawancara Joko, 27 Maret 2019). Dalam pertemuan trah keluarga tersebut, TIK menyampaikan maksud dan keinginannya mencalonkan diri sebagai Lurah Sriharjo. TIK memaparkan kondisi Sriharjo yang terpuruk dan membutuhkan pemimpin yang mampu memperbaharunya. Ternyata apa yang disampaikan TIK tersebut gayung bersambut- seluruh keluarga mendukung bahkan ada yang memberikan biaya untuk proses pencalonan. Dukungan keluarga besar tersebut menambah energi TIK dan

mereka secara spontan menggerakkan relasi atau jejaring untuk mendukung TIK.

Ketiga, modal jejaring. Setelah TIK mendapat dukungan keluarga besar, langkah berikutnya ialah mendekati mantan teman-teman Karang Taruna. Sekitar tahun 2003-2007 TIK aktif dalam kegiatan Karang Taruna. *“Balai Desa adalah rumah saya. Setiap malam saya di Balai Desa”* (Wawancara TIK, 12 Maret 2019). Dari pernyataan TIK tersebut tampak bahwa dia pernah menjadi aktifis desa dan berkarya nyata membangun desa. *“Dulu mbak Titik pernah membangun jembatan layang dan kerja sama dengan museum Masri Simgarimbun”* (Wawancara Suparjiyono, 27 Maret 2019). Ternyata teman-teman Karang Taruna juga resah dengan kondisi Sriharjo yang stagnan. Ketika mereka mendengar TIK akan mencalonkan diri sebagai Lurah- mereka datang dan mendukungnya.

Adapun respon positif mereka mendukung TIK sebagai Lurah dilatarbelakangi tiga hal, yakni: (1) TIK telah memiliki rekam jejak peduli terhadap masyarakat Sriharjo, hal ini dibuktikan dengan karya nyata; (2) para relawan tersebut bergerak ke RT dan dukuh membentuk tim yang cair, dan; (3) mereka dengan tulus menjadi relawan pemenangan TIK tanpa dibayar. Para relawan tersebut secara spontan dari mulut ke mulut membentuk tim cair yang tidak dapat dideteksi oleh kandidat yang lain. Mereka menyebut diri sebagai tim cair yang berbaur ke masyarakat, tanpa ketua, sekretaris dan bendahara atau tim sukses yang terstruktur.

Keempat, virus sedulur sejati. Oleh karena paguyuban masyarakat Sriharjo sangat kuat, maka modal sosial menjadi salah satu faktor penentu kemenangan TIK. *”Kami mendukung mbak Titik dengan tulus dan politik uang. Kami mensosialisasikan*

sedulur sejati, sedulur sing ora ngapusi.” (Wawancara Bambang, 27 Maret 2019). Sedulur sejati (persaudaraan sejati) tersebut menjadi perekat bagi para relawan, dan mereka berkomitmen untuk tidak menukar persaudaraan dengan politik uang. Persaudaraan sejati ini menjadi roh gotong royong yang telah diwariskan sejak dulu oleh nenek moyang mereka. Artinya dengan adanya momentum pemerintahan desa stagnan - munculnya TIK sebagai kandidat Lurah - hal ini memicu para pemuda untuk bergotong royong saling mendukung.

Kelima, sosialisasi. Setelah dukungan keluarga dan Karang Taruna diperoleh, langkah selanjutnya yang dilakukan TIK ialah sosialisasi visi, misi dan program ke kelompok masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan TIK diantaranya mendatangi dari rumah ke rumah penduduk, gabungan kelompok petani, kelompok perempuan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selama kurang lebih dua bulan TIK intensif melakukan sosialisasi dengan memaparkan kondisi Sriharjo yang stagnan, dan membutuhkan perubahan untuk kemajuan. Ketika TIK mengadakan pertemuan dengan warga - mereka minta tiga mesin genset. *“Saya tidak bisa memberi apa-apa, namun saya bisa kerja apa saja”* (Wawancara TIK, 12 Maret 2019). Dalam setiap sosialisasi TIK menekankan pentingnya suara warga dan menolak politik uang.

“Kalau saya memberi uang kepada bapak/ibu untuk beli ini - itu, nanti kalau saya jadi Lurah akan mencari cara bagaimana mengembalikan hutang dan tidak memikirkan kemajuan desa. Apakah bapak/ibu mau Sriharjo maju seperti desa-desa yang lain?” (Wawancara TIK, 12 Maret 2019).

Dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang membangun Sriharjo

yang maju, maka mereka mulai sadar dan mulai mendukung TIK. Hasil dari sosialisasi TIK secara intensif dari rumah ke rumah dalam kurun waktu dua bulan, ada tiga hal, yakni:

Pertama, senasib sepenanggungan. Inti sosialisasi TIK ialah pemaparan pemerintahan desa yang stagnan, visi, misi dan program memajukan Sriharjo. Hal ini memunculkan rasa senasib sepenanggungan dari masyarakat. Mereka merasakan kesulitan yang sama, karena pelayanan publik tidak berjalan dengan baik. Dampaknya pembangunan ekonomi dan infrastruktur Sriharjo tertinggal dibanding desa-desa tetangga. Ketika banjir menimpa warga Sriharjo tahun 2017, pihak pemerintah Desa tidak cepat merespon membantu korban.

“Pemerintah Desa tidak punya uang untuk membantu para korban banjir. Masyarakat berinisiatif membuat dapur umum tanpa bantuan Pemerintah Desa.” (Wawancara Joko, 27 Maret 2019).

Namun warga masyarakat secara spontan saling membantu untuk menolong para korban banjir. Tampaknya semangat para Karang Taruna bergotong royong membuka dapur umum terulang kembali dalam proses pencalonan TIK sebagai Lurah. Semangat senasib sepenanggungan sebagai korban secara struktural, karena tidak berfungsinya pelayanan publik menjiwai mayoritas masyarakat Sriharjo.

Kedua, kepercayaan masyarakat. Munculnya figur TIK di tengah krisis kepemimpinan membawa arus segar. Didukung oleh jejak rekam TIK sebagai aktivis pemuda - hal ini memunculkan kepercayaan masyarakat. Munculnya TIK seolah memberi harapan baru, mereka menginginkan Sriharjo maju secara ekonomi seperti desa-desa tetangga.

Kepercayaan masyarakat terhadap TIK ini penting dalam kontestasi Pilkades sebab tanpa kepercayaan TIK tidak akan menang. TIK tidak akan menang mutlak tanpa dukungan masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini tertransformasi dalam perolehan suara bagi TIK.

Ketiga, elektabilitas. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap TIK, hal ini menaikkan elektabilitas. Artinya dengan adanya kepercayaan dan elektabilitas yang tinggi, hal ini dapat diprediksi bahwa TIK akan menang. Hal ini bisa dipetakan di setiap pedukuhan atau RT, siapa pendukung TIK dan siapa pendukung kandidat yang lain. Dalam Pilkades Sriharjo yang relatif sedikit pemilihnya (6.055 orang), pemetaan elektabilitas dapat diprediksi dengan mudah, apalagi TIK memiliki tim cair di setiap RT atau pedukuhan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Demokrasi Desa bermuara dari hati nurani rakyat yang berbasis pada nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Namun dengan adanya Pemilihan Kepala Desa secara langsung, hal ini merusak budaya masyarakat Desa. Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa, para kandidat diperhadapkan permasalahan adanya politik uang. Kandidat yang tidak memberikan uang atau barang akan kalah dalam Pemilihan Kepala Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya, sebab kandidat merebut kekuasaan dalam Pilkades Sriharjo tanpa politik uang. Kandidat menggunakan strategi politik hati nurani. Cara yang dipergunakan kandidat untuk merebut kekuasaan ialah dengan merebut hati masyarakat melalui mendatangi dari rumah ke rumah selama dua bulan. Selain itu kandidat didukung oleh tim cair (Karang

Taruna) yang tulus ikhlas bekerja dan membaaur dalam masyarakat yang sulit terdeteksi oleh pesaing lain.

Oleh karena kandidat menggunakan politik hati nurani, maka muncul rasa senasib sepenanggungan, kepercayaan dan elektabilitas dalam masyarakat. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap TIK, maka mereka tidak mempan disuap dengan uang atau barang oleh tim sukses lain.

4.2. Saran

Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa memperhatikan faktor sosial budaya masyarakat, dimana dengan maraknya politik uang hal ini merusak jiwa solidaritas dan kerukunan antar warga Desa. Sesungguhnya pemilihan Kepala Desa secara langsung bukanlah cerminan demokrasi yang substansial, namun melalui musyawarah untuk mufakat nilai-nilai saling menghargai perbedaan, dan kebersamaan akan terwujud.

Untuk para peneliti ada baiknya penelitian tentang Pemilihan Kepala Desa seperti ini perlu dikembangkan dan dipertajam dengan metode yang berbeda, sehingga akan dihasilkan karya penelitian yang berkualitas dan bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adojutelegan, Nat. 2018. *Vote Selling: Infrastructure and Public Sector. Dissertation.*
<https://scholarworks.walden.edu/dissertation/diakses> 4 April 2019

Ainillah, Siti, Rahmatul. 2016. Elite Politik dan Kontestasi di Desa dengan Menggunakan Studi Peran Blater dalam Pilkades di Desa Banjar, Bangkalan, Madura. *Jurnal Politik*

Muda. Volume 5, Nomor 3, Agustus-Desember: 282-290.

- Alexander, Amy C., Ronald Inglehart, and Christian Welzel. 2018. "Measuring Effective Democracy: A Defense." *International Political Science Review* 33.1 Apple, Michael W., and Eleni Schirmer. "Struggling for the Local: Money, Power, and the Possibilities of Victories in the Politics of Education." *The Struggle for Democracy in Education*. Routledge, pp.41-62.
- Almond, Gabriel Abraham., and Sidney Verba. 2015. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Aspinall, Edward., and Noor Rohman. 2017. "Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in the Remaking of Indonesia's Rural Elite." *Journal of Southeast Asian Studies* 48.1: 31-52.
- Atia, Mona., and Catherine, E. Herrold. 2018. "Governing Through Patronage: The Rise of NGOs and the Fall of Civil Society in Palestine and Morocco." *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, pp. 1-11.
- Berger, Arthur. Asa. 2017. *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. Routledge.
- Björkman, Lisa. 2014. "You Can't Buy a Vote": Meanings of Money in a Mumbai Election." *American Ethnologist* 41.4: 617-634.
- Callahan., William A. 2018. *Pollwatching, Elections and Civil Society in Southeast Asia*. Routledge.

- Cooke, Maeve. 2018. "Five Arguments for Deliberative Democracy." *Democracy as Public Deliberation*. Routledge.
- Cramer, Katherine J. 2016. *The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker*. University of Chicago Press.
- Fang, Arnold H. 2016. "Linkage Between Rural Voters and Politicians: Effects on Rice Policies in the Philippines and Thailand." *Asia & the Pacific Policy Studies* 3.3: 505-517.
- Fitriyah. 2015. Cara Kerja Politik Uang. *Jurnal Politika*, Volume 6 Nomor 2, Oktober: 101-111.
- Halili. 2009. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi di Desa Pakandangan, Barat Bluto, Sumenep, Madura. *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)*. Volume 14, Nomor 2, Oktober: 99-112.
- Hammar, Tomas. 2017. *Democracy and the Nation State*. Routledge.
- Hariato, Mudji Rahardjo dan Bambang Martin Baru. 2018. Politik Uang dan Konflik Horisontal dalam Pemilihan Kepala Desa, di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. *Makalah Seminar Nasional Sistem Informasi 2018*, 9 Agustus. Malang: Fakultas Teknik Informasi-UNMER.
- Haskell, John. 2018. *Direct Democracy or Representative Government? Dispelling the Populist Myth*. Routledge.
- Heath, Oliver and Louise Tillin. 2017. Institutional Performance and Vote Buying in India. *Journal St. Comp. Int. Dev.* 53:90-110.
- Hewison, Kevin. 2017. "Reluctant populists: Learning populism in Thailand." *International Political Science Review* 38.4: 426-440.
- Heywood, Andrew. 2018. *Essentials of Political Ideas*. Palgrave.
- Hidayat, Endik, Budi Prasetyo dan Setya Yuwana. 2018. Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuatan di Pilkades Desa Sitimento Pada Tahun 2016. *Jurnal Sospol*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember:124-151.
- Hirschmann, David. 2001. Challenges of Managing Local Elections in Transitional and Developing Countries: An Illustrative Essay. *Journal Public Administration and Development*, February, 21:15-24.
- Hoipkemier, Mark. 2018. "Justice, Not Happiness: Aristoteles on the Common Good." *Polity* 50.4: 547-574
- Johnston, Ronald John. 2014. *Money and Votes: Constituency Campaign Spending and Election Results*. Routledge.
- Karim, Achmad, Jamaludin. 2007. Kepemimpinan Wanita Madura. *Jurnal Mimbar*, Volume XXIII, Nomor 2, April-Juni:221-234.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2009. Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tentang Kebijakan Publik setelah Pilkada Langsung. *Makalah Konferensi Administrasi Negara-Surabaya*. <https://ugm.ac.id/diakses> 4 April 2019.
- Malong, Roselyn G. 2017. Vote Buying in Election: A Closer Look on Electoral Trading in Tago, Surigo, Del Sur, Philippines. *International Journal of Management and Applied Science*, Volume 3, Issue-12, December:82-86.

- Moran, Michael., and Geraint Parry. 2015. *Democracy and Democratization*. Routledge.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2013. Politik Uang dan Dinamika Politik Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara "Party ID" dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10, Nomor 1, Juni: 3:41-58.
- Olver, Crispian. 2018 "Patronage and Politics in a South African City: A Case Study of Nelson Mandela Bay." *Area Development and Policy* 3.3:275-292.
- Ortmann, Stephan. "The Umbrella Movement and Hong Kong's Protracted Democratization Process." *Asian Affairs* 46.1:32-50.
- Prasetyoningsih, Dwi dan Adi, Agus Satmoko. 2016. Strategi Perempuan Kepala Desa dalam Menerapkan Gaya Kepemimpinan yang Demokratis di Desa Kendal Sewu, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 03, No.04:1136-1152.
- Rahe, Paul. A. 2017. "Aristotle and Modern Politics." *The American Journal of Jurisprudence*. 62,1:29-44.
- Ratnawati, Dewi., dan Agus, Satmoko. Adi. 2016. Hubungan Penerimaan Money Politic Dengan Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Munung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol.03, No.04:1855-1869.
- Romli, Lili. 2018. Pilkada Langsung, Calon Tunggal dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 15, Nomor 2.
- Rudiadi, dan Ratna, Herawati. 2017. Pemilihan Kepala desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 1:132-151.
- Suharto, Didik G.2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supardi, H. 2011. Kapasitas Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Konteks Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Jelbuk dan Desa Sabrang). *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 1, Juni:18-26.
- Sutoro, Eko. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. (Eds). Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Takeuchi, Hiroki, 2013. Vote Buying, Village Elections and Authoritarian Rule in Rural China: A Game Theoretic Analysis. *Journal of East Asian Studies*, 13:69-105.
- Tawakkal, George., Towar Ikbal., Wisnu Suhardono., Andrew, D. Garnes., and Thomas Seitz. 2017. Consistency and Vote Buying: Income, Education and Attitudes about Vote Buying in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 17:313-329.
- Tjahjoko, Guno Tri. 2016. *Politik Ambivalensi: Nalar Elit di balik Pemenangan Pilkada*. Yogyakarta: PolGov.
- Trott, Adriel M. 2019. "Aristotle, Politics: A New Translation, Translated by CDC Reeve." *Polis: The Journal for*

- Ancient Greek and Roman Political Thought* 36, 1:170-176.
- Van Ham, Carolien., and Staffan, Lindberg. 2015. From Sticks to Carrots: Electoral Manipulation in Africa, 1986-2012. *Journal Government and Opposition*. Volume 50, No.3:521-548.
- Vengroff, Richard., and Lucy, Creevey. 2018, "Senegal: The Evolution of A Quasi Democracy." *Political Reform in Francophone Africa*. pp. 204-222. Routledge.
- Weiss, Meredith L.2016."Payoffs, Parties, or Policies:"Money politics" and Electoral Authoritarian Resilience." *Critical Asian Studies*, 48.1:77-99.
- Widyawati, Anis.2018. Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa. [https://journal unnes.ac.id/sju/index.php/snh/](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/), diakses 4 April 2018.
- Yuningsih, Neneng, Yani., dan Valina, Singka. Subekti. 2016. Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. *Jurnal Politik*. Volume 1, Nomor 2 Februari.
- Zhao, Shukai. 2017."Peasants and Rural Democracy." *Regeneration of Peasants*. pp.63-138. Singapore: Springer.